



Penelitian

## Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Gununglurah Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas

Chamid Sutikno<sup>1</sup>, Indah Ayu Permana P<sup>2</sup>, Zaula Rizqi Atika<sup>3</sup> dan Ariesta Amanda<sup>4</sup>

<sup>1234</sup> Program Studi Administrasi Publik Universitas Nahdaltul Ulama Purwokerto

\* Korespondensi : [c.sutikno@unupurwokerto.ac.id](mailto:c.sutikno@unupurwokerto.ac.id).

### Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai implementasi kebijakan dari pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Gununglurah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas. Program keluarga harapan (PKH) merupakan program pemerintah dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi, pendidikan dan peningkatan produktivitas pemberdayaan bagi masyarakat secara berkelanjutan. Metode dalam penelitian ini menggunakan deskriptif melalui pendekatan kualitatif, yang menggambarkan suatu masalah dalam penelitian berdasarkan jawaban dari masalah tersebut. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk menguji keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber yaitu dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan teori implementasi kebijakan publik dengan melihat aspek kebijakan yang ideal, kelompok sasaran, organisasi pelaksana dan faktor lingkungan yang mempengaruhi pelaksanaan implementasi kebijakan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Implementasi kebijakan dalam pelaksanaan program keluarga harapan secara umum dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang ada. Perlunya upaya dan strategi pada pelaksanaan program keluarga harapan dari berbagai stakeholders agar pencapaian tujuan dari pelaksanaan program tercapai secara sistematis. Program keluarga harapan yang saat ini dilaksanakan saat ini sudah mampu meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat dengan penghasilan rendah agar secara bertahap berdaya dalam pemenuhan kebutuhan hidup sesuai standar kelayakan

**Kata Kunci:** *Implementasi Kebijakan, Stakeholders, Program Keluarga Harapan (PKH).*

### Abstract

*This study discusses the policy implementation of the implementation of the Family Hope Program in Gununglurah Village, Cilongok District, Banyumas Regency. The Hopeful Family Program (PKH) is a government program in terms of increasing community welfare in the economic, educational and increasing productivity of community empowerment in a sustainable manner. The method in this study uses descriptive through a qualitative approach, which describes a problem in research based on the answer to the problem. The data collection techniques used in this study are: interviews, observation and documentation. To test the validity of the data, researchers used a source triangulation technique, namely by checking the data that had been obtained through several sources. This research was conducted using the theory approach of public policy implementation by looking at aspects of the ideal policy, target groups, implementing organizations and environmental factors that influence the implementation of policy implementation. From the research results it is known that the implementation of policies in the implementation of the Family Hope program in general can run according to existing provisions and policies. The need for efforts and strategies in implementing the Family Hope program from various stakeholders so that the objectives of implementing the program are achieved systematically. The Hope Family Program which is currently being implemented has been able to increase the community's economic empowerment, especially people with low incomes so that they are gradually empowered in fulfilling the necessities of life according to eligibility standards.*

## Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Gununglurah Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas

**Keywords:** Policy Implementation, Stakeholders, Program Keluarga Harapan (PKH)

### 1. Pendahuluan

Implementasi kebijakan sebagai serangkaian proses setelah fase penetapan suatu program yang ditujukan pada realisasi konkret dari tujuan kebijakan publik (Umar, Zulkarnain. 2018). Implementasi kebijakan adalah suatu proses dinamis dimana para pelaksana kebijakan melakukan suatu tindakan untuk menghasilkan hasil yang sejalan dengan tujuan atau sasaran kebijakan (Agustino. 2014). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu bagian terpenting dalam siklus kebijakan publik dengan tujuan untuk merealisasikan kebijakan yang telah ditetapkan. Salah satu implementasi kebijakan yang saat ini menjadi fokus pemerintah yaitu implementasi kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan. Kebijakan penanggulangan kemiskinan saat ini menjadi salah satu program pemerintah untuk bisa secara bertahap mengurangi angka kemiskinan yang ada saat ini dengan berbagai program bantuan dalam penguatan ekonomi masyarakat.

Kemiskinan merupakan salah satu bentuk persoalan yang telah lama berkembang dalam masyarakat yang mengakibatkan dampak besar terhadap perilaku kehidupan dan menjadi perhatian umum yang menjadi prioritas untuk diselesaikan. Permasalahan mengenai kemiskinan yang ada di Indonesia yaitu suatu bentuk permasalahan dalam bidang sosial yang menjadikan permasalahan tidak dapat menemukan solusi secara cepat dan efektif dalam menyelesaikan masalah tersebut (Kwong, Yan Wai. 2019). Hal tersebut menunjukkan bahwa masalah kemiskinan benar-benar bukanlah suatu permasalahan yang mudah namun dapat dikategorisasikan ke dalam suatu permasalahan yang sulit untuk diatasi. Pemerintah Indonesia sebenarnya sudah banyak mengambil langkah dan membuat suatu kebijakan terkait dengan masalah kemiskinan, namun sampai sekarang masalah kemiskinan masih banyak dijumpai di berbagai daerah. Kebijakan yang ada belum sepenuhnya berjalan secara optimal dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia.

**Tabel 1.1.** Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2018 - 2020

Bulan Tahun	dan	Jumlah Penduduk Miskin (juta jiwa)	% Penduduk	Jumlah
Maret (2018)		25,95	9,82	
Maret (2019)		25,14	9,41	
Maret (2020)		26,42	9,78	

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas, jumlah penduduk yang mengalami kemiskinan di Indonesia pada Maret 2018 mencapai 25,95 juta orang atau 9,82 persen. Sedangkan pada Maret 2019 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan yaitu menjadi sebesar 25,14 juta jiwa atau 9,41 persen

## Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Gununglurah Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas

dan pada Maret 2020 jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami kenaikan yaitu menjadi sebesar 26,42 juta jiwa atau 9,78 persen (Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, 2019). Kemiskinan juga terjadi di Provinsi Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Banyumas yang mendapat julukan sebagai Kota Satria, dijuluki sebagai Kota Satria karena kota ini memiliki banyak pahlawan nasional. Untuk lebih jelasnya berikut disajikan tabel mengenai keadaan kemiskinan di Kabupaten Banyumas sejak tahun 2018 – 2020, berdasarkan garis kemiskinan, jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin.

**Tabel 1.2.** Garis kemiskinan, jumlah, dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Banyumas tahun 2018 – 2020

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin
2018	366 442	226,20	13,50
2019	385 140	211,60	12,53
2020	406 250	225,80	13,26

*Sumber: Data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2021*

Berdasarkan data tabel di atas menunjukkan bahwa, kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Banyumas pada tahun 2018 yaitu sebesar 226,20 ribu atau 13,50 persen. Dan pada tahun 2019 mengalami penurunan sehingga jumlah penduduk miskin menjadi sebesar 211,60 ribu atau 12,53 persen. Akan tetapi pada tahun 2020 mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu dengan jumlah penduduk miskin sebesar 225,80 ribu atau 13,26 persen (Banyumas, 2021). Jumlah kemiskinan pada tahun 2020 di Kabupaten Banyumas termasuk dalam peringkat kedua jumlah kemiskinan terbanyak setelah Kabupaten Brebes. Kenaikan jumlah kemiskinan di Kabupaten Banyumas pada tahun 2020 diantara lain disebabkan oleh faktor adanya pandemi Covid- 19 di mana banyak warga masyarakat di Kabupaten Banyumas yang terkena PHK dikarenakan perusahaan yang menjadi tempat bekerja tidak dapat beroperasi secara maksimal bahkan ada yang menutup perusahaannya untuk sementara waktu. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyumas pada tahun 2020 adalah sebesar 225,80 (ribu) atau sekitar 13,26 %. Sedangkan Kabupaten Brebes adalah sebesar 308,78 (ribu) atau sekitar 17,03% ( Musa, Umar Farouk. 2019).

Kecamatan Cilongok merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Banyumas yang memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi dan menjadi salah satu kecamatan yang menerima manfaat dari program keluarga harapan (PKH). Saat ini salah satu desa yang memiliki tingkat kemiskinan dan penerima manfaat dari program PKH adalah Desa Gununglurah. Desa Gununglurah termasuk salah satu desa yang sebagian besar penduduknya menerima bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) mencapai 823 KPM di tahun 2022. Sejak program PKH mulai diimplementasikan di Desa Gununglurah sejak tahun 2013-2018, angka kemiskinan yang ada di desa tersebut tergolong masih lumayan tinggi diantara desa lainnya di Kecamatan Cilongok, dikarenakan program PKH yang ada belum dapat berjalan secara optimal.

## **Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Gununglurah Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas**

---

Berdasarkan data yang diperoleh dari SP2DPKH jumlah penerima PKH di Kecamatan Cilongok tahun 2022 sebesar 9.257 KPM, Kecamatan Cilongok menjadi salah satu kecamatan di Kabupaten Banyumas yang termasuk dalam penerima bantuan PKH. KPM PKH terbanyak adalah dari Desa Gununglurah yang mencapai 823 KPM PKH. Melalui peningkatan jumlah KPM PKH yang terjadi di Desa Gununglurah menjadi titik perhatian utama untuk mengevaluasi kebijakan program kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Banyumas. Permasalahan pelaksanaan program PKH yang ada di Desa Gununglurah dikarenakan ada beberapa faktor diantaranya pertama, masih rendahnya jiwa kewirausahaan yang ada sehingga diperlukan sosialisasi khusus atau pembinaan terkait dengan masalah kewirausahaan. Kedua, dikarenakan masih adanya data yang belum terintegrasi di DTKS sehingga di waktu pencairan dana bantuan PKH ada penerima PKH yang tidak menerima bantuan. Ketiga masih adanya ketergantungan terhadap bantuan dari PKH.

Dalam pelaksanaannya, sejak awal adanya program PKH di Desa Gununglurah jika dilihat dari data jumlah penerima program PKH disebutkan pada tahun 2022 mengalami peningkatan terhadap jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM), hal ini tentunya bertolak-belakang dengan tujuan dari adanya program PKH yakni menumbuhkan atau meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat, berdasarkan kasus yang ada maka dapat disimpulkan bahwa masih tingginya angka kemiskinan di Desa Gununglurah hal tersebut menunjukkan bahwa tujuan dari program PKH belum dapat tercapai secara optimal. Melihat hal tersebut penelitian ini mencoba menganalisis mengenai Implementasi kebijakan mengenai Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2022 di Desa Gununglurah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas.

### **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif interaktif . Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yang berbasis pada proses bentuk implementasi dalam ini adalah kebijakan dari Program Keluarga Harapan di Desa Gununglurah, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas interaktif. Pengumpulan data penelitian ini melalui proses wawancara, observasi dan dokumentasi (Morgan, 2017). Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purpose sampling*. Analisis data menggunakan analisis interaktif yang bertujuan untuk menganalisis dalam penelitian pertama dan desain ekplanatori untuk menganalisis dalam penelitian kedua (Cresswell&cresswell 2018). Sasaran penelitian ini terdiri Unsur Pemerintah Desa Gununglurah, Koordinator PKH Kecamatan Cilobgok, Pendamping PKH Desa Gununglurah dan masyarakat penerima bantuan PKH. Para informan dipilih secara *purpose sampling* sesuai dengan tujuan penelitian, validitasi data penelitian ini menggunakan triangulasi data sumber dan dokumen (Cresswell&Cresswell. 2018).

### **3. Hasil**

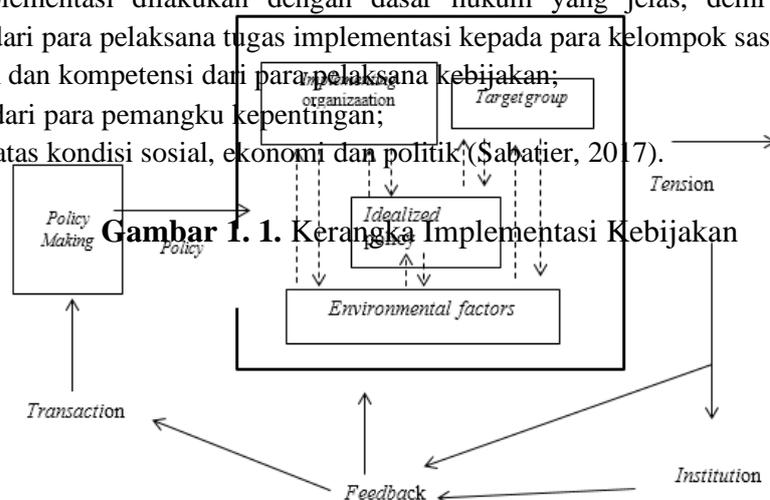
#### **3.1. Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)**

Pemahaman yang baik mengenai kebijakan publik dapat diperoleh dengan menguraikannya menjadi beberapa bagian sebagai tahapan-tahapan, diantaranya yaitu: *agenda setting*, formulasi, legitimasi, implementasi, evaluasi, reformulasi dan terminasi (Lane1, et. Al. 2017). Kebijakan publik menjadi salah pembahasan yang merujuk pada aktor seperti lembaga

## Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Gununglurah Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas

pemerintah, legislatif untuk memilih dan melakukan suatu tindakan yang tepat dalam memfasilitasi masyarakat umum (Anderson, 2017). Implementasi kebijakan merupakan proses yang dinamis yang masuk dalam struktur pemerintahan dan sistem administrasi dengan pedoman aturan secara legal (Asna Aneta. 2016). Dimana salah satu dari rangkaian kebijakan publik, adalah melaksanakan program-program yang telah disepakati untuk bisa dilaksanakan. Tahap ini disebut sebagai tahap implementasi dilaksanakan melalui aturan dan prosedur administrasi terkait dengan pelaksanaannya (Arizzo, 2019). Implementasi menjadi model upaya untuk menciptakan suatu kebijakan yang diharapkan melalui pendekatan procedural dalam organisasi (Savard, 2019). Terdapat 5 (lima) faktor yang menjadi alasan dari keberhasilan suatu implementasi kebijakan public, diantaranya yaitu: *viability*, *theoretical integrity*, *scope*, *capacity*, dan *unintended consequences*. Berdasarkan berbagai kajian literature yang dilakukan, diketahui bahwa terdapat 6 (enam) variable pokok yang dianggap dapat memberikan sumbangsih atas keberhasilan dan kegagalan dari implementasi kebijakan. Ke-enam variable tersebut diantaranya adalah:

- Tujuan dan sasaran kebijakan yang rinci dan konsisten;
- Dukungan teoritis yang kuat dalam merumuskan kebijakan;
- Proses implementasi dilakukan dengan dasar hukum yang jelas, demi terjaminnya kepatuhan dari para pelaksana tugas implementasi kepada para kelompok sasaran;
- Komitmen dan kompetensi dari para pelaksana kebijakan;
- Dukungan dari para pemangku kepentingan;
- Kestabilan atas kondisi sosial, ekonomi dan politik; (Sabatier, 2017).



Sumber : Thomas B. Smith 1973

Sementara pandangan Smith (1973) mengenai proses pelaksanaan kebijakan harus memperhatikan empat aspek:

## **Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Gununglurah Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas**

---

1. Kebijakan yang Diidealkan: Aspek kebijakan yang diidealkan merujuk pada upaya memperhatikan sasaran kebijakan agar sesuai dengan tujuan kebijakan yang diharapkan.
2. Organisasi Pelaksana kebijakan: Aspek organisasi pelaksana kebijakan memiliki tujuan agar kebijakan dikelola dengan baik oleh para implementator, dalam hal ini birokrasi pemerintahan.
3. Lingkungan Kebijakan: Aspek lingkungan kebijakan bisa dilihat dari lingkungan sosial, lingkungan geografis dan lingkungan budaya yang berpengaruh langsung terhadap kebijakan yang sedang dilaksanakan.

Sebagai suatu sarana untuk mendalami permasalahan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 3 (tiga) aspek implementasi menurut Smith, diantaranya adalah *Idealized Policy*, *Target Group*, *Implementing Organization*, dan *Environmental factors*. Kebijakan pengentasan kemiskinan adalah program yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka menanggulangi dan mengurangi masalah kemiskinan. Berbicara mengenai kemiskinan sudah berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menanggulangnya, namun secara keseluruhan belum sepenuhnya dapat tercapai secara maksimal. Kemiskinan sampai saat ini masih terus menjadi masalah fenomenal sepanjang sejarah di Indonesia. Kemiskinan tersebut telah membuat banyak warga masyarakat dan jutaan anak tidak dapat mengenyam pendidikan, kesehatan serta kebutuhan hidup yang layak (Kalimba. 2019). Kemiskinan merupakan suatu ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial yang meliputi modal produktif atau asset, sumber keuangan, pengetahuan dan keterampilan serta informasi yang berguna untuk kemajuan hidup (Leaung, et al. 2019). Dengan demikian untuk menjamin kehidupan masyarakat miskin pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan untuk mengatasi dan mengurangi terkait masalah kemiskinan tersebut. Cara pemerintah dalam melaksanakan pengentasan kemiskinan adalah dengan adanya perlindungan sosial.

Skema bantuan sosial merupakan skema bantuan yang bertujuan untuk menyediakan sumber daya minimum bagi individu dan rumah tangga yang hidup di bawah standar penghasilan tertentu tanpa mempertimbangkan aspek kontribusi dari penerimanya (Normaliza, A.M & Kamarulazizi Ibrahim. 2020). Skema bantuan sosial dapat difokuskan kepada kelompok target tertentu seperti keluarga miskin dengan anak, hingga penduduk lanjut usia dengan penghasilan terbatas. Program bantuan sosial memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial melalui pengurangan kemiskinan. Bantuan sosial yang diberikan dalam program bansos tidak tergantung kepada kontribusi dari penerima manfaatnya. Bantuan sosial dapat diberikan secara langsung dalam bentuk uang (In-Cash Transfers), dan juga dalam bentuk barang dan pelayanan (In-Kind Transfers). Bantuan sosial sifatnya tertuju untuk penduduk yang mempunyai kerentanan dalam kemiskinan (Normaliza, A.M & Kamarulazizi Ibrahim. 2020)

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah dalam mengatasi kemiskinan. Kebijakan nasional ini dibuat dalam rangka untuk mengurangi angka kemiskinan melalui adanya program yang berbasis keluarga. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Program Keluarga Harapan merupakan program yang dibuat oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia sejak

## **Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Gununglurah Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas**

---

tahun 2007 sebagai upaya pengembangan sistem perlindungan sosial. (Kemensos, 2020) berikut gambar yang menunjukkan bahwa PKH berada pada klaster 1 dalam skema kebijakan nasional penanggulangan kemiskinan.

PKH merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengembangkan sistem perlindungan sosial dan strategi intervensi pengentasan kemiskinan di Indonesia dengan mengadopsi Bantuan Tunai Bersyarat (Conditional Cash Transfers) yang sudah banyak diterapkan berbagai negara. Landasan hukum PKH adalah Undang-Undang No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Dalam penelitian ini, Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2022 di Desa Gununglurah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, dianalisis berdasarkan *idealized policy, target groups, implementing organization, Environmental factors*. Adapun hasil penelitian dalam penelitian ini yaitu tujuan dari program PKH sudah sesuai dengan tujuan dari pemerintah diantaranya membantu meringankan beban pengeluaran bagi rumah tangga sangat miskin (RTSM), meningkatkan taraf pendidikan dasar dan peningkatan di bidang kesehatan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, program PKH sudah selayaknya dapat dilanjutkan supaya tujuan dari Negara Indonesia dapat segera tercapai. Kebutuhan KPM di Desa Gununglurah khususnya di bidang pendidikan masih kurang dikarenakan ada KPM yang menyekolahkan anaknya di sekolah swasta dimana setiap bulannya ada iuran wajib yang harus dibayarkan, sedangkan kebutuhan di bidang kesehatan para KPM sudah merasa tercukupi karena mereka dapat berobat secara gratis di faskes yang telah ditentukan.

Respon penerima bantuan terhadap program yaitu menerima kehadiran program PKH dan mereka merasa senang karena dapat terbantu dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar. Dalam hal penyaluran bantuan masih mengalami kendala yaitu pada saat penyaluran dana bantuan dari pusat kadang belum sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, akan tetapi secara keseluruhan proses penyaluran dana bantuan PKH di Desa Gununglurah sudah berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil pengumpulan data serta analisis peneliti dan wawancara secara mendalam terkait komitmen dan perubahan pola pikir peserta PKH di Desa Gununglurah dapat ditarik kesimpulan secara keseluruhan komitmen dan pola pikir peserta PKH harus didukung dengan sikap produktif secara sosial dan ekonomi.

### *3.2. Idealized policy*

*Idealized policy* merupakan pendekatan yang berupaya membangun suatu kesamaan dari kebijakan yang dianggap relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Padahal dalam suatu organisasi, efektivitas komunikasi dari seorang pemimpin berpengaruh langsung terhadap kinerja pendamping atau kelompok serta unsur lembaga di bawahnya (Nwagboso, Chris. 2019). Pada aspek kebijakan yang ideal atau yang diharapkan memiliki fungsi utama yaitu penyesuaian terhadap kebijakan dengan tujuan dan landasan hasil yang akan dicapai. Seperti halnya implementasi kebijakan dalam Program Keluarga Harapan di Kabupaten Banyumas menjadi salah satu program pemerintah dalam bidang sosial bagi masyarakat untuk bisa diimplementasikan dengan baik. Proses implementasi kebijakan mengenai Program Keluarga Harapan di Kabupaten Banyumas, pemerintah sudah memiliki beberapa kebijakan yang merujuk pada hal tersebut diantaranya:

## Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Gununglurah Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas

---

1. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.
2. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026

Kebijakan yang ideal dalam Implementasi Kebijakan mengenai Program Keluarga Harapan akan memiliki dampak secara langsung terhadap model dan desain kelembagaan pemerintah. Desain kelembagaan pemerintah menjadi faktor penentu dalam implementasi kebijakan mengenai Program Keluarga Harapan di masyarakat. Desain kelembagaan ini berupaya untuk menentukan sejauh mana keterbukaan lembaga atas berbagai rencana strategi yang akan dilakukan dalam implementasi kebijakan dalam Program Keluarga Harapan dimasyarakat. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa desain kelembagaan dalam proses implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Banyumas secara umum dilakukan dengan sangat terbuka. Lembaga yang terlibat dalam melakukan implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan terus melakukan komunikasi dan koordinasi lintas *stakeholders* untuk bisa secara bersama-sama dalam melaksanakan kebijakan yang sesuai dengan arah strategi pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Selanjutnya, dalam peraturan menteri dan peraturan daerah terlihat desain kelembagaan pemerintah membuat jalur koordinasi dari mulai level pemerintah kecamatan desa dan kelurahan di Kabupaten Banyumas secara terstruktur dengan baik. Hal ini sangat membantu pemerintah dan lembaga yang terkait dalam melakukan rencana strategi dalam kebijakan yang telah ditetapkan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan dari program keluarga harapan baik di wilayah desa maupun di wilayah perkotaan.

### 3.3. Target groups

Dalam studi implementasi kebijakan publik tentunya tidak bisa dilepaskan dari aspek *target group* (kelompok sasaran) yang dapat mendorong upaya keberhasilan kebijakan. Kelompok sasaran adalah mereka yang menjadi subjek kebijakan yang kemudian mendapatkan manfaat dari kebijakan yang dilaksanakan baik jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Kompetensi merupakan salah satu faktor penentu dari keberhasilan atas suatu implementasi kebijakan. Kompetensi dimaknai sebagai suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam menyelesaikan tugasnya dengan benar dan memiliki kelebihan yang didasarkan atas berbagai hal yang berkaitan dengan pengetahuan, keahlian dan sikap (Emron *et al*, 2019). Dalam konteks implementasi kelompok sasaran bukan hanya sekedar subjek tetapi menjadi pihak yang juga mampu mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Salah satu unsur *core value* dalam implementasi kebijakan terkait dengan pemahaman kondisi kelompok sasaran menjadi syarat dan ketentuan yang harus dijalankan, pernyataan tersebut bermakna bahwa kelompok sasaran semakin tinggi dalam ikut serta dalam partisipasi secara aktif dalam proses implementasi kebijakan.

Dalam proses implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan tentunya tidak bisa lepas dari sistem dan peraturan terhadap koordinator dan Pendamping PKH yang terlibat baik dari kelembagaan pemerintah maupun masyarakat dan pihak swasta. Pihak-pihak tersebut tentunya memiliki tujuan dan kepentingan yang hendak dicapai. Pihak-pihak yang terlibat dalam hal ini, tidak bisa dilepaskan dari proses pelaksanaan kebijakan yang akan dilakukan. Kelompok sasaran dalam kebijakan Program Keluarga Harapan adalah mereka yang masuk dalam data

## **Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Gununglurah Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas**

---

penerima kelompok Manfaat dimasyarakat yang membutuhkannya. Dari hasil penelitian ini juga pemerintah dan berbagai pihak yang terlibat secara terstruktur dalam melaksanakan Program Keluarga Harapan dari mulai dari tingkat kabupaten sampai dengan tingkat desa dan kelurahan. Selain itu hampir sebagian besar masyarakat yang menjadi kelompok sasaran dalam pelaksanaan kebijakan mengenai Program Keluarga Harapan adalah masyarakat yang berada dalam kondisi kemiskinan dengan penghasilan rendah dan masuk dalam kategori dalam penerima manfaat dari Program Keluarga Harapan.

Dengan adanya implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Banyumas ini pemerintah berupaya menjalankan rencana-rencana secara teknis dalam kegiatan yang bukan hanya pada aspek pelaksanaan melainkan juga upaya pengentasan kemiskinan secara bertahap. Secara umum kemunculan permasalahan mengenai kemiskinan ditandai dengan adanya kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi yang dipengaruhi faktor dari penghasilan kurang dari yang dibutuhkan. Sehingga langkah pertama pemerintah adalah memetakan penyebab perkembangan kemiskinan secara komprehensif dengan mengumpulkan data masyarakat melalui kelompok-kelompok sosial dan praktisi sosial.

### *3.4. Implementing organization*

Model organisasi yang melaksanakan kebijakan harus mampu mengembangkan pendekatan yang relevan dan bisa dipahami oleh setiap kelompok sasaran, hal ini bertujuan agar tingkat keberhasilan kebijakan mampu dilaksanakan dengan baik oleh seluruh pihak baik pelaksana maupun penerima program. Dalam konteks implementasi kebijakan peran organisasi pelaksana sangat penting yang mana harus mampu menerjemahkan kebijakan secara detail dan mengeksplorasi berbagai macam alternatif untuk mencapai kepentingan publik. Dalam perspektif kebijakan, bahwa pihak atau yang juga bisa disebut dengan aktor berasal dari berbagai lembaga yang tercakup dalam supra struktur politik dan infrastruktur politik. Hal ini, tentunya tidak bisa dilepaskan dari masalah kebijakan. Dalam arah kebijakan menunjukkan arah interaksi kekuasaan yang menentukan suatu pilihan untuk ditentukan. Artinya kebijakan mengarah pada serangkaian tindakan sistematis untuk mencapai tujuan tertentu yang dibuat oleh aktor yang berpengaruh atau berkuasa dalam kebijakan yang bersifat otoritatif. Sehingga, dapat dipahami hubungan antara kedua makna tersebut bersumber pada konsep kekuasaan *power* dan *policy* merupakan hasil dari interaksi kekuasaan antar *stakeholders*.

Mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Banyumas tentunya tidak bisa terlepas dari berbagai pihak yang terlibat. Hal tersebut selaras dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Robbins dan Judge (2017), bahwa keterlibatan kerja dimaknai sebagai suatu kondisi dimana tingkat seseorang menyatukan dirinya ke dalam suatu pekerjaan dan secara aktif turut berkontribusi dalam implementasi Program Keluarga Harapan di Kabupaten Banyumas seperti pemerintah kabupaten ataupun desa, dinas sosial maupun lembaga swasta lain yang tergabung dalam kerjasama pelaksanaan program keluarga harapan.

### *3.5. Environmental factors*

## **Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Gununglurah Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas**

---

Aspek lingkungan menjadi faktor dan penentu kebijakan yang akan dilaksanakan hal ini, dikarenakan organisasi pelaksana kebijakan tidak bisa menjalankan kebijakan tanpa dukungan penuh dari lingkungan yang ada untuk mencapai keberhasilan kebijakan. Lingkungan dalam perspektif kebijakan menjadi salah satu upaya yang harus dikembangkan dengan pendekatan budaya dan sosial masyarakat agar kebijakan yang dilaksanakan tidak bertentangan dan tetap memperhatikan kondisi masyarakat secara menyeluruh. Hal tersebut dikarenakan dalam implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan tidak lepas dengan adanya faktor lingkungan sosial dan lingkungan ekonomi. Saat ini di Kabupaten Banyumas fokus pemerintah dan pihak-pihak dalam implementasi dari kebijakan Program Keluarga Harapan bukan hanya pada kebijakan secara sosial, tetapi juga memberikan edukasi dan pemahaman bagi masyarakat, khususnya masyarakat kalangan ekonomi menengah kebawah. Faktor ekonomi dan kemiskinan menjadi salah satu faktor masyarakat dengan penghasilan rendah tidak mampu sepenuhnya dalam mencukupi kebutuhan hidup.

Lingkungan sosial masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah juga menjadi faktor dimana kondisi kemiskinan yang ada tidak ditanggapi secara serius. Saat ini pemerintah berupaya mengembangkan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Banyumas berupa pemberian bantuan pangan dan biaya bagi masyarakat miskin yang termasuk dalam prasyarat Program Keluarga Harapan yang juga berupaya untuk mengembangkan dan mendorong pemberdayaan ekonomi agar masyarakat secara bertahap berdaya dan bisa mencukupi kebutuhan hidup sesuai standar kelayakan. Artinya, dari hasil penelitian ini dapat diketahui terkait dengan keberhasilan implementasi kebijakan dalam Program Keluarga Harapan ini juga ditentukan oleh faktor lingkungan yang juga harus mendukung. Selain itu, pemerintah Kabupaten Banyumas juga dalam pengentasan masyarakat miskin dilakukan secara komperhensif, bukan hanya pada pemberian bantuan pangan dan biaya bagi anak tetapi juga mulai memberdayakan ekonomi keluarga berpenghasilan rendah. Dengan demikian, diharapkan implementasi kebijakan dalam Program Keluarga Harapan ini menjadi acuan dan role model yang diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat.

### **4. Pembahasan**

Gununglurah merupakan sebuah desa yang terletak di Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Desa ini terletak di bagian timur Kabupaten Banyumas dan berbatasan dengan beberapa desa lain seperti Wanareja, Linggasari, dan Kedungdowo. Akses utama ke desa ini adalah melalui Jalan Raya Wanareja - Cilongok. Data menunjukkan bahwa sejak program PKH diterapkan di Desa Gununglurah, jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) meningkat pada tahun 2022. Namun, ini bertentangan dengan tujuan program PKH untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa meskipun program PKH telah diterapkan, angka kemiskinan di Desa Gununglurah masih tinggi, sehingga tujuan program PKH belum dapat tercapai secara optimal. Peningkatan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terjadi di Gununglurah dari tahun ke tahun bukan menjadi salah satu acuan yang menyatakan bahwa program PKH sudah gagal. Namun, bila peningkatan KPM tidak disertai dengan peningkatan kesejahteraan dan pengurangan angka kemiskinan seperti yang terjadi di Gununglurah, maka dapat dianggap bahwa program PKH belum mencapai

## **Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Gununglurah Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas**

---

tujuannya dengan optimal. Faktor-faktor seperti perubahan kondisi sosial-ekonomi masyarakat penerima manfaat, atau kesenjangan dalam distribusi bantuan dan sumber daya, dapat menyebabkan beberapa keluarga tidak mendapat manfaat yang seharusnya. Oleh karena itu, program PKH perlu dilakukan secara berkelanjutan dan evaluasi secara berkala perlu dilakukan untuk memperhatikan perubahan kondisi sosial-ekonomi masyarakat dan memastikan pencapaian tujuan program secara optimal.

Kebijakan yang ideal dalam implementasi Program Keluarga Harapan akan memiliki dampak langsung terhadap model dan desain kelembagaan pemerintah. Desain kelembagaan ini berupaya menentukan sejauh mana keterbukaan lembaga atas berbagai rencana strategi yang akan dilakukan dalam implementasi kebijakan. Penelitian menunjukkan bahwa desain kelembagaan dalam proses implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Banyumas dilakukan dengan sangat terbuka. Lembaga yang terlibat dalam melakukan implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan terus melakukan komunikasi dan koordinasi lintas stakeholders untuk bisa secara bersama-sama melaksanakan kebijakan yang sesuai dengan arah strategi pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Selanjutnya, dalam peraturan menteri dan peraturan daerah terlihat desain kelembagaan pemerintah membuat jalur koordinasi dari mulai level pemerintah kecamatan desa dan kelurahan di Kabupaten Banyumas secara terstruktur dengan baik. Hal ini sangat membantu pemerintah dan lembaga yang terkait dalam melakukan rencana strategi dalam kebijakan yang telah ditetapkan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan dari program keluarga harapan baik di wilayah desa maupun di wilayah perkotaan. Dalam studi implementasi kebijakan publik, target group (kelompok sasaran) menjadi faktor penting dalam keberhasilan kebijakan. Kelompok sasaran bukan hanya subjek tetapi juga menjadi pihak yang mampu mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Salah satu unsur core value dalam implementasi kebijakan terkait dengan pemahaman kondisi kelompok sasaran menjadi syarat dan ketentuan yang harus dijalankan. Dalam proses implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan, tidak bisa lepas dari sistem dan peraturan terhadap koordinator dan pendamping PKH yang terlibat baik dari kelembagaan pemerintah maupun masyarakat dan pihak swasta. Kelompok sasaran dalam kebijakan Program Keluarga Harapan adalah mereka yang masuk dalam data penerima kelompok manfaat di masyarakat yang membutuhkan.

### **5. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, dari aspek Idealized policy dimaksudkan untuk mempercepat pergerakan penyelesaian masalah kemiskinan secara bertahap yang sesuai dengan aturan dan prosedur sesuai dengan peraturan menteri dan peraturan daerah terkait dengan standard dan teknis pelaksanaan dalam Program Keluarga Harapan di masyarakat. Pemerintah dan pihak-pihak yang terlibat didalamnya selalu berupaya memberikan fasilitas dan keterbukaan akses informasi dalam upaya pemetaan dan langkah strategis dari level pemerintah desa, kelurahan, kecamatan agar terencana secara sistematis dalam implementasi dari kebijakan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Banyumas. Target group, yaitu kelompok sasaran yang menjadi fokus dalam implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan saat ini sudah mulai memiliki kesadaran dengan koordinator Program dan pendampingan kelompok kerja serta kelompok masyarakat penerima manfaat. Secara umum masyarakat menerima baik dari

## **Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Gununglurah Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas**

---

semua program-program pemerintah salah satunya program keluarga harapan. Implementing organization, yaitu pihak-pihak yang tergabung dalam implementasi kebijakan program keluarga harapan baik dari unsur pemerintah daerah, kelompok masyarakat dan pihak swasta saat ini sudah terjalin komunikasi dan sinergisitas agar pelaksanaan program dapat berjalan sesuai dengan rulunya. Environmental factors merupakan identifikasi terkait dengan penentuan keberhasilan implementasi kebijakan program keluarga harapan, dimana pemahaman terhadap lingkungan sosial dan kondisi ekonomi masyarakat menjadi factor penentu dalam implmentasi program keluarga harapan. Pemerintah bukan hanya berfokus pada pelaksanaan program keluarga harapan dari sisi sosial dan ekonomi tetapi juga upaya dalam peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat dengan penghasilan rendah agar secara bertahap berdaya dalam pemenuhan kebutuhan hidup sesuai standar kelayakan.

### **Ucapan Terima Kasih**

Terimakasih penulis ucapkan untuk teman-teman yang sudah membantu jalannya penelitian ini dan semua narasumber terkait yang sudah membantu penulis dalam menyelesaikan artikel ini.

### **Pendanaan**

Penulisan artikel ini dilakukan secara mandiri.

### **Referensi**

1. Agustino, Leo. (2017). Dasar-dasar Kebijakan Publik. Cv Alfabeta. Bandung.
2. Andersson Annika Lantz et.al. 2015. What's the problem? Meaning making and learning to do mathematical word problems in the context of digital tools Annika. Published online: 25 January 2008. Department of Education, LinCS, Goteborg University,300, 405 30 Goteborg, Sweden.
3. Arizzo. (2017). Public Policy Implementation, Research Project: Literature Review. Tennessee State University Department of Public Administration.
4. Asna Aneta. (2016). Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Kota Gorontalo. Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1 Thn. Universitas Negeri Gorontalo
5. Babatunde, Binoyo. (2019).”Effect of Poverty Reduction Programmes on Economics

## **Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Gununglurah Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas**

---

- Development Evidence from Nigeria.” *Arabian Journal of Bussines Nad Management Review (OMAN Chapter)*, Vol 4, No 1, Pp 26 -37
6. B.Miles, M., Huberman, A. M., & Saldana, J. 2019. *Qualitative Data Analysis - Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, Johnny Saldaña - Google Books*. In Sage Publications.
  7. Creswell, & Creswell. 2018. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches - John W. Creswell, J. David Creswell - Google Books*. In SAGE Publications, Inc.
  8. Kalimba, Edmond, Jaya Sukhla & Mbabazi Mbabazize. (2019). Effect of Credit Management System on Financial Performance of Development Bank in Rwanda: Case Study of Development Bank of Rwanda, “ *The International Journal Of Business & Management*”, Vol 4 No 4
  9. Kusumanegara Solahuddin, (2010). *Model dan aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*. Gava Media. Yogyakarta.
  10. Kwong, Yan Wai. (2019). A Review of the Impacts of Agenda-sett. *Journal of Communication and Education*, 2(2). Communication Research Centre, Department of Journalism and Communication, Hong Kong Shue Yan University, Hong Kong
  11. Lane1, Jan Erik and Wallis, Joe. (2017). Non-profit organizations in public policy implementation. *Journal of public administration and policy research* Vol. 1(7) pp. 141-149. University of Freiburg, 79098 Freiburg im Breisgau, Germany.
  12. Leaug, et al. (2019). ”Support for Policies to Improve the Nutritional Impact of the Supplemental Nutrition Assistance Program in California”. *American Journal of Public Health*, Vol 105, No.8
  13. Madani Muhlis (2017). *Dimensi Interkasi Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
  14. Morgan, D. L. 2017. *Integrating Qualitative and Quantitative Methods: A Pragmatic Approach*. In *Integrating Qualitative and Quantitative Methods: A Pragmatic Approach*. <https://doi.org/10.4135/9781544304533>
  15. Nathan, A. J., & Scobell, A. 2019. Experience sampling method :Measuring the quality of everyday life. In *Foreign Affairs* (Vol. 91, Issue 5).
  16. Nwagboso, Chris. (2019). “Public Policy and the Challenges of Policy Evaluation in the Third World “. *British Journal of Humanities and Social Sciences* Vol 5, No.1, Pp 59-76
  17. Normaliza, A.M & Kamarulazizi Ibrahim. (2020). “Poverty Reduction for Sustainable Development: Malaysia’s Evidence-Based Solutions”. *Global Journal of Social Sciences Studies*, Vol. 3, No. 1, Pp 29 – 42.
  18. Philip, Dahida Deewua. 2018. *Public Policy Making and Implementation in Nigeria: Connecting the Nexus*. *Public Policy and Administration Research*. Vol.3, No.6. Department of Public Administration, University of Abuja, P.M.B 117 Abuja-Nigeria.
  19. Routh Aaron S. et al. (2016). Using Theory to Understand Public Support for Collective Actions that Impact the Environment: Alleviating Water Supply Problems in a Nonarid Biome. *Social Science Quarterly*, Volume 86, Number 4, December 2005.

**Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Gununglurah Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas**

---

20. Savard, Francois Jean. With the collaboration of R. Banville. (2017). "Policy Cycles," in L. Cote and J.-F. Savard (eds.), *Encyclopedic Dictionary of Public Administration*.
21. Stewart Jenny. (2018). *Public policy as information*. School of Business, University of New South, Wales, Canberra, Australia, 2013. Vol.31, No. 1. Sumber,<http://dx.doi.org/10.1080/08109028.2013.763630>.
22. Theoria Stiftelsen. (2017). *Philosophy and Public Policy*. Published by Blackwell Publishing, 9600 Garsington Road, Oxford OX4 2DQ, UK, and 350 Main Street, Malden, MA 02148, USA.
23. Umar, Zulkarnain. (2018). Model Implementasi Kebijakan serta Strategi Terhadap Pendekatan Kebijakan Publik. *Jurnal baca Vol VIII, No IV. Program Studi Ilmu Administrasi. Universitas Islam Makasar*. Hal 282.
24. Sahi, Nirmala Afrinti, Taufiqurokhman, And Andriansyah. (2019). "Policy Implementation of The Family Hope Program in Empowering the Poor In Bone Bolango District." (January). Doi: 10.4108/Eai.1-4-2019.2287277.